**REFORMASI PARADIGMATIK BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH (*LOCAL GOVERMENT*)**

Oleh:

Sudirman

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Reformasi yang digulirkan pasca runtuhnya orde baru 1998, memberikan perubahan tatanan dan paradigma bernegara yang begitu signifikan. Agenda reformasi yaitu demokratisasi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi aktualisasikan secara praktek dengan merubah seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat kebebasan yang dipancarkan dari demokrasi dipahami dengan begitu sederhana, bahwa dengan perubahan segalanya akan lebih baik. Seolah semangat telah menenggelamkan segala rasionalitas, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tanpa diiringi oleh pemikiran dan telaah secara mendalam. Tidak mengherankan apabila perubahan yang terjadi kurang substansial, kurang tepat sasaran, dan tidak mendatangkan kemanfaatan yang signifikan bagi kemakmuran rakyat, lebih-lebih justru mendatangkan kerusakan tatanan dan kesemrautan sistem bernegara. Semangat reformasi telah kehilangan rohnya.

Tidak tersentuhnya birokrasi oleh perubahan, merupakan salah satu indikasi bahwa reformasi belum menyentuh substansinya. Birokrasi di Indonesia tetap mengikuti pola lama yang digariskan oleh rezim orde baru yaitu berbelit, lama, berorientasi pada penguasa, dan penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga birokrasi justru menjadi ladang subur bagi para pejabat negara yang bermental tempe, dengan menjadikan kekuasaan hanya untuk memperkaya diri dan antek-anteknya.

Paradigma birokrasi “kolot” itu kemudiah dibawah ke ranah daerah dengan agenda desentralisasi dengan UU No 32 tahun 2003. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota diwarisi sebagaian kewenangan pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun sayang, pewarisan kewenagan tersebut tidak diiringai oleh pewarisan sistem birokrasi baru yang efektif, efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sehingga “setali tiga uang” di daerah birokrasi juga menjadi ladang subur korusi, Jangan heran apabila banyak kepala daerah dan pejabat daerah terjerembab dalam kubangan korupsi.

Dalam pemerintahan daerah masih belum ditemui birokrasi efektif, efisien, dan berorentasi kepentingan rakyat. Birokrasi pemerintahan daerah cenderung mengikuti pola birokrasi lama. Sehingga sampai saat ini belum ditemui pemerintahan daerah yang benar-benar memberikan pelayanan maksimal bagi rakyat. Oleh karena itu, perlu diubah sistem manajemen pengelolaan birokratis “kolot” tersebut dengan suatu sistem manajemen pengelolaan yang berbasis organisasi perusahaan dengan mengedepankan pada hasil, manfaat, efektif, efisen, profesional, transparan dan bertanggung jawab, sehingga dalam pengelolaan pemerintahan daerah dapat mencapai tujuan yaitu kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah, dalam konteks ini ditujukan untuk mendorong keterlibatan daerah dalam proses pembangunan sehingga pemerintahan daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya, dan diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan *reinventing government* yang bermakna perncarian format birokrasi yang mempunyai kemampuan untuk memperbarui secara mandiri dan mempunyai mentalitas wirausaha. Hal ini karena otonomi daerah dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai memerlukan birokrasi yang efisien, yang secara cepat mampu memperbarui diri dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Namun dalam konteks Indonesia, usaha mengimplementasikan konsep *reinventing government* ini akan banyak mendapatkan tantangan. Hal ini karena model birokrasi di Indonesia dicirikan oleh model birokrasi patrimonial, birokrasi rente, dan *bureaucratic polity*. Jika dirunut kembali dengan seksama, model-model birokrasi seperti ini sangat bertentangan dengan model birokrasi wirausaha. Oleh karena itu, usaha mewirausahakan birokrasi tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa terlebih dahulu menghancurkan model birokrasi yang lama. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari elite politik. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrasi.

Revitalisasi peran birokrasi dengan sedikit atau banyak alasan memang harus dilakukan. Ada lima faktor yang mendorong revitalisasi peran birokrasi di daerah mutlak dilakukan, yakni tuntutan otonomi daerah, demokratisasi politik, pertumbuhan kelas menengah kritis, globalisasi ekonomi nonliberal, dan perubahan paradigma manajemen lembaga public. Dengan melihat kelima faktor ini, tuntutan revitalisasi birokrasi di daerah menjadi tidak bisa ditunda-tunda lagi. Perubahan-perubahan ini membuat birokrasi lama yang berorientasi kekuasaan dan cenderung menjadi instrument kekuasaan pemerintah tidak lagi memadai. Sebaliknya, dituntut peran birokrasi baru yang lebih efektif, efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta responsif terhadap perubahan.

Untuk itu, serangkaian usaha harus dilakukan. Beberapa ahli menyarankan berbagai usaha untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana menginjeksikan siprit wirausaha ke dalam birokrasi pemerintahan daerah. Meskipun ada beberapa kelemahan dari gagasan birokrasi wirausaha ini, tetapi banyak gagasan dari model birokrasi ini yang bisa digunakan untuk menyegarkan kembali birokrasi pemerintahan sehingga lebih energik dalam melayani masyarakat seperti lembaga-lembaga swasta. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan implementasi birokrasi wirausaha sebagaiaman dikemukakan Osborne dan Gaebler ataupun Osborne dan Plastrik bisa diwujudkan jika terjadi perubahan mindset. Oleh karena itu, di tengah warisan birokrasi colonial dan orde baru yang sangat otoriter dan sentralistik di mana birokrasi menjadi instrument pemerintah, abdi negara itu harus diubah cara berfikirnya menajdi abdi masyarakat. Mereka harus bekerja untuk dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pihak yang mesti mereka layani.

Perubahan mindset adalah penting, tetapi akan menjadi persoalan jika sumber daya manusia dalam tubuh birokrasi mempunyai kualitas yang kurang bagus. Oleh karena itu, sebelum program mindsetting dilakukan, harus didahului audit sumber daya manusia terlebih dahulu untuk mengetahui secara pasti potensi dan kelemahan mendasar yang dimiliki oleh sumber daya birokrasi diluar persoalan-persoalan yang lebih bersifat kebudayaan. Sebuah reformasi haruslah holistic dalam pengertian mampu mengatasi keseluruhan persoalan yang ada, dan itu dibutuhkan komitmen politik yang tinggi dari elite-elite yang tidak sebatas pada usaha melanggengkan kekuasaan mereka.